

RELASI GENDER DALAM INSTITUSI KELUARGA DALAM PANDANGAN TEORI SOSIAL DAN FEMINIS

Danik Fujiati

Pemerhati Perempuan dan Gender, Mahasiswi S2 Yogyakarta

Danik_Fujiati@yahoo.co.id

Abstract: This study departs from the author's interest against the reality of gender relations within the family institution is always influenced by local cultural reality in which the family lives. Through various theories concerned with this case, the purpose of this study to understand more about the views of both theories related to gender relations in the family as an institution istitusi smallest of a society. The conclusion of this study, that each theory recognizes that the socio-cultural construction of significant influence over pembagiaan role played by the male (husband) and a woman (wife) in the family institution. That is, the social construction of culture was instrumental in the creation of relations contribute between men and women in the family isntitusi fairly or otherwise occurred inequality.

Keywords : Family, Gender relations, Social theory and Feminist

Abstrak: Penelitian ini berangkat dari minat penulis terhadap realitas hubungan gender dalam institusi keluarga selalu dipengaruhi oleh realitas budaya lokal di mana keluarga tinggal. Melalui berbagai teori yang bersangkutan dengan kasus ini, tujuan dari penelitian ini untuk memahami lebih lanjut tentang pandangan dari kedua teori yang berkaitan dengan relasi gender dalam keluarga sebagai institusi terkecil istitusi dari masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa setiap teori mengakui bahwa konstruksi sosial budaya pengaruh signifikan atas peran pembagiaan dimainkan oleh laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam institusi keluarga. Artinya, pembangunan sosial budaya sangat berperan dalam penciptaan hubungan berkontribusi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga isntitusi cukup atau terjadi ketimpangan.

Kata Kunci: Keluarga, relasi gender, teori sosial dan feminis

Pendahuluan

Keluarga merupakan lembaga terkecil dari suatu masyarakat yang di dalamnya mempunyai beberapa anggota, biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Sama dengan institusi atau lembaga lainnya yang lebih besar, maka di dalam suatu keluarga, juga ada nilai-nilai yang dibangun dan disepakati bersama antara anggota keluarga yang satu dengan lainnya. Nilai-nilai tersebut, biasanya juga tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dimana keluarga tersebut tinggal. Misalnya, apabila masyarakat di lingkungan sekitar bernuansa patriarkhis, maka nilai-nilai yang dibangun dalam institusi keluarga tersebut juga bersifat patriarkhis. Sebaliknya, apabila nilai yang dibangun dilingkungan masyarakat bersifat matriarkhi, maka nilai-nilai yang ada dalam keluarga tersebut juga cenderung ke matriarkhi. Sedangkan, apabila nilai-nilai modern yang bersifat liberal dan demokratis sudah menjadi tatanan umum di lingkungan suatu masyarakat, maka tidak bisa dipungkiri institusi keluarga tersebut juga akan mengikuti arus yang ada dalam suatu masyarakatnya tersebut.

Pola relasi gender dalam suatu institusi keluarga juga akan mengikuti pola nilai dan tatanan yang sudah mengejawantah dan dibangun oleh

masyarakat sekitar di mana keluarga tersebut hidup dan tinggal. Pola relasi gender dalam masyarakat yang bercorak patriarkhis, tentunya lebih didomasi oleh pihak laki-laki sebagai orang yang memiliki kewenangan (kekuatan) lebih tinggi daripada perempuan. Sebaliknya dalam pola relasi gender yang bersifat matriarkhis, kewenangan lebih didominasi oleh perempuan. Sedangkan dalam masyarakat liberal-demokratis yang cenderung egaliter, maka terjadi keseimbangan dalam pola relasi antara laki-laki dan perempuan. Implikasi dari ketiga model tatanan masyarakat tersebut juga berbeda satu dengan lainnya, baik negatif maupun positif. Misalnya, dalam masyarakat patriarkhis akan terjadi ketidakseimbangan dalam pola relasi yang dibangun antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks masyarakat seperti ini, sering memunculkan adanya ketidakadilan gender yang tentunya berdampak pada diri perempuan. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang disebabkan oleh tatanan masyarakat yang berbasis pada nilai patriarkhis, misalnya: diskriminasi, marginalisasi, beban ganda, stereotype dan kekerasan berbasis gender, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat pada umumnya.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka akan dikaji lebih jauh mengenai

relasi gender dalam institusi keluarga dalam pandangan teori sosial dan teori feminis. Kajian ini merupakan hal yang penting untuk dibahas, dengan tujuan untuk memahami lebih dalam mengenai pandangan dari kedua teori tersebut terkait dengan relasi gender yang ada dalam institusi keluarga sebagai suatu institusi terkecil dari suatu masyarakat, yang tentunya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat sekitar.

Pembahasan

A. Wacana Gender Dan Institusi Keluarga

1. Wacana Gender.

a. Konsep Gender Dan Seks

Konsep gender tidak akan bisa dipahami secara komprehensif tanpa melihat konsep jenis kelamin (sex). Kekeliruan pemahaman dan pencampuradukian kedua konsep tersebut sebagai sesuatu yang tunggal, akan melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam kamus bahasa Inggris, *sex* dan *gender*, sama-sama diartikan sebagai “jenis kelamin (Echols, Shadily, 1993: 263). Akan tetapi pada literatur lain (Lihat dalam Helen Tierney (ed), dalam *Women's Studies Encyclopedia*,

Vol.1, New York: Green Wood Press, hlm.153. Juga dalam Victoria Neufeldt (ed), *Websters New World Dictionary*, New York: Websters New World Clevenland, 1984, hlm. 561. Dan dalam Hilary M Lips, *Sex and Gender : An Introduction*, London: Mayfield Publising Company, 1993.hlm.4. Masih banyak literatur lain yang berbicara dengan konsep yang sama) keduanya mempunya arti yang berbeda. Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu. Gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosio-kultural.

Nazarudin Umar menegaskan, konsep gender adalah konsep dimana pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada pemahaman yang bersifat normatif dan kategori biologis melainkan pada kualitas dan *skill* berdasarkan konvensi-konvensi sosial. Sebagai konsep sosial-budaya, perbincangan gender tentu lebih dinamis karena mempertimbangkan variabel psiko-sosial yang berkembang di masyarakat. (Umar, 1999: xx)

Berangkat dari konsep di atas, menurut hemat penulis bisa saja seseorang yang secara biologis dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut gender berperan sebagai laki-laki atau sebaliknya. Misalnya, seorang suami yang karena satu hal memilih bekerja di rumah mengasuh anak dan mengurus kehidupan rumah tangga (domestik), maka dari segi gender dia memilih berperan sebagai perempuan, meskipun secara seksual adalah laki-laki. Sebaliknya seorang istri karena ketrampilannya dan kesepakatan bersama memilih bekerja mencari nafkah atau mengembangkan kariernya sebagai pekerja kantor, maka dia berperan gender laki-laki meskipun secara seksual adalah perempuan.

Dalam konteks teori *nature* dan *nurture*, pemahaman mengenai konsep gender dibedakan dengan dua landasan yang berbeda. Teori *nature* menganggap, perbedaan laki-laki dan perempuan bersifat kodrat, *given from Allah*. Anatomi biologis yang berbeda dari laki-laki dan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial dua jenis kelamin tersebut. Laki-laki berperan utama dalam masyarakat karena dianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Sedangkan perempuan karena organ reproduksinya (hamil, menyusui

dan menstruasi), dinilai memiliki ruang gerak terbatas. Perbedaan itulah yang akhirnya melahirkan pemisahan dua fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan di sektor publik dan perempuan di sektor domestik.

Teori *nurture* beranggapan, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan hasil konstruksi masyarakat. Sehingga peran sosial (peran domestik mutlak milik perempuan dan publik mutlak milik laki-laki), yang selama ini dianggap baku bahkan dipahami sebagai doktrin agama, sesungguhnya bukan kehendak Tuhan dan tidak juga sebagai produk diterminis biologis, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial (*social construction*).

Menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa, konsep gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya atau non-biologis. Dengan bahasa yang lengkap, gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, sebagai hasil konstruksi sosio-kultural yang tumbuh dan disepakati oleh masyarakat dengan proses panjang serta bisa berubah dari

waktu ke waktu, tempat ke tempat, bahkan dari kelas-ke kelas sesuai perkembangan zaman.

Gender bukan kodrat atau ketentuan Allah SWT, karena terkait dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki atau perempuan berperan dan bertindak sesuai tata nilai ketentuan sosial-budaya masyarakatnya. Sedangkan seks adalah kodrat atau ketentuan Allah SWT, bersifat *given* dan jelas-jelas bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak bisa ditukar. Akan tetapi, dengan proses sosialisasi yang panjang dan penguatan secara kultural bahkan oleh negara atas ideologi gender menjadikan “seolah-olah” gender sama dengan jenis kelamin biologis (seks).

b. Biologis Dan Peran Gender.

Perbedaan biologis dan komposisi kimia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, memang tidak pernah menimbulkan perdebatan. Akan tetapi, efek dari perbedaan biologis itulah yang menimbulkan perdebatan. Menurut Unger, perbedaan anatomi biologis dan komposisi kimia dalam tubuh berpengaruh pada perkembangan emosional dan kapasitas intelektual antara laki-laki dan perempuan,

sehingga berpengaruh pada perilaku dan peran gender yang harus dimainkan dalam struktur sosial. Laki-laki bersifat maskulin dengan berbagai perilaku yang melekat (agresif, rasional, cerdas dan lain-lain). Perempuan bersifat feminim dengan berbagai perilaku yang juga melekat padanya (emosional, lemah, kurang cerdas dan lain-lain). Unger mengidentifikasi perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan dengan berbagai karakter laki-laki lebih unggul dari pada perempuan. (Rhoda K.Unger, 1979: 30).

Pendapat Unger ditolak oleh kalangan feminis dengan pernyataan: “*Apa yang dikemukakan oleh Unger hanya sebagai bentuk stereotip gender yang diperkuat dengan berbagai mitos, bahwa perempuan adalah makhluk ciptaan kedua.*” Persepsi tersebut mengendap dalam alam pikiran perempuan sehingga mereka “rela” menerima perbedaan peran gender yang dinilai kurang adil sekalipun. Mereka membantah adanya skematisasi perilaku manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Perbedaan anatomi tubuh dan genetika antara laki-laki dan perempuan didramatisir dan dipolitisir terlalu jauh,

seolah-olah secara substansial perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Bahkan Simone de Beauvoir salah seorang feminis liberal, dengan tegas menyatakan, seorang disebut perempuan dengan berbagai atribut yang melekat padanya, bukan ada sejak lahir melainkan dikonstruksi oleh individu yang bersangkutan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Asumsinya adalah, setiap orang mempunyai kehendak bebas untuk menentukan cara berprilaku, berpikir dan memilih peran gender yang diinginkannya. (Ratna Megawangi, 1999: 236.) Oleh karena itu, peran gender seseorang (laki-laki dan perempuan) bisa berubah dan diubah sesuai kehendaknya.

Perbedaan pendapat kedua kubu di atas, dielaborasi oleh Pierre Van den Berge, Lionel Tiger dan Robin Foxini dengan teori sosio biologis yang mengemukakan bahwa, Gabungan faktor biologis dan sosial menyebabkan laki-laki lebih unggul dibandingkan perempuan. (Teori ini mencoba mengelaborasi antara teori nature dan nurture. Teori *nature* dengan tegas menganggap bahwa perbedaan gender laki-laki dan perempuan disebabkan karena faktor alamiah/biologis. Teori *nurture* menganggap perbedaan gender disebabkan oleh faktor budaya masyarakat). (Ratna Megawangi, 1999:

131) Fungsi reproduksi perempuan dianggap sebagai penghambat mengimbangi kekuatan dan peran laki-laki. Laki-laki dominan secara politis dalam masyarakat karena prediposisi biologis bawaan mereka. Pendapat tersebut mendapat pengakuan dari beberapa ahli psikologi. Misalnya Sigmund Freud, dengan teori psikoanalisa. (Tri Dayakisni dan Hudaniah, 2003: 17)

Sigmund Freud, walaupun mengakui bahwa unsur biologis menjadi faktor penentu kepribadian seseorang, akan tetapi orang tua juga ikut mempengaruhi perilaku tersebut. Menurut Freud, pada masa *phallic stage* (usia 3-6 tahun), seorang anak mulai menghubungkan identitas ayah dan ibunya dengan alat kelamin yang dimilikinya. Pada masa ini, perkembangan kepribadian antara anak laki-laki dan perempuan mulai berbeda. Perbedaan ini melahirkan formasi sosial berdasarkan identitas gender, baik yang bersifat laki-laki maupun perempuan. Pola hubungan ayah dan ibu yang setiap hari disaksikan oleh anak, semakin memperkuat kesan bahwa ibu adalah inferior dan ayah adalah superior. Dari penyataan di atas, Freud, jelas-jelas mengakui bahwa unsur nonbiologis juga

ikut menyumbang terbentuknya peran gender dan perilaku seseorang.

Biddle dan Thomas menyatakan bahwa, tingkah laku dibentuk oleh peranan-peranan yang diberikan oleh masyarakat kepada individu-individu. Faktor sosial dan budaya berpengaruh pada tingkah laku individu dalam situasi dan tempat yang berbeda. Peranan juga mempengaruhi nilai-nilai yang dipegang seseorang dan pertumbuhan pribadi seseorang. Perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan menyebabkan kepribadian antara keduanya juga berbeda.

Dengan tidak bermaksud untuk berpihak pada salah satu pemikiran dan melepaskan faktor biologis, penulis lebih setuju kalau pembentukan peran gender lebih didominasi faktor sosial. Artinya bahwa, daya dukung faktor biologis tetap ada, akan tetapi dengan prosentase yang lebih kecil dibanding faktor sosial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Chodorow bahwa, anak laki-laki tumbuh dalam suasana timpang dan mengalami ambivalensi dalam pandangan mereka tentang perempuan, sehingga mereka belajar untuk menjadi *seksis* ketika dewasa. (Ratna Megawangi, 1999: 53). Dengan alur pikir terbalik bisa diartikan, berarti kalau anak laki-laki tumbuh dalam

“suasana yang tidak timpang”, maka mereka tidak akan menjadi *seksis*. “Suasana timpang dan tidak timpang” dalam pernyataan tersebut adalah faktor lingkungan sosial dan “anak laki-laki” sebagai salah satu contoh jenis kelamin biologis adalah faktor biologis. Jadi bisa saja anak perempuan dengan kondisi yang sama mengalami *impact* yang berbeda.

Berkaitan dengan peran gender, perlu diingat kembali istilah-istilah kegiatan produktif, reproduktif dan kemasyarakatan yang digunakan dalam analisis gender terutama Model Moser dan Harvard, antara lain: 1) kegiatan produktif yaitu kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat dalam rangka mencari nafkah. Kegiatan ini disebut juga kegiatan ekonomi karena kegiatan ini menghasilkan uang secara langsung atau barang yang dapat dinilai setara uang. Contoh kegiatan ini adalah bekerja menjadi buruh, petani, pengrajin dan sebagainya; 2) kegiatan reproduktif yaitu kegiatan yang berhubungan erat dengan pemeliharaan dan pengembangan serta menjamin kelangsungan sumber daya manusia dan biasanya dilakukan dalam keluarga. Kegiatan ini tidak menghasilkan uang secara langsung dan biasanya dilakukan bersamaan dengan tanggung jawab domestik atau

kemasyarakatan dan dalam beberapa referensi disebut reproduksi sosial. Contoh peran reproduksi adalah pemeliharaan dan pengasuhan anak, pemeliharaan rumah, tugas-tugas domestik, dan reproduksi tenaga kerja untuk saat ini dan masa yang akan datang (misalnya masak, bersih-bersih rumah) dan; 3) kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan politik dan sosial budaya yaitu kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat yang berhubungan dengan bidang politik, sosial dan kemasyarakatan dan mencakup penyediaan dan pemeliharaan sumber daya yang digunakan oleh setiap orang seperti air bersih/irigasi, sekolah dan pendidikan, kegiatan pemerintah lokal dan lain-lain. Kegiatan ini bisa menghasilkan uang dan bisa juga tidak menghasilkan uang.

c. Dikotomi Peran Gender Melahirkan Ketimpangan Relasi Gender .

Relasi gender adalah konsep hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan berdasar kualitas, *skill*, peran dan fungsi dalam konvensi sosial yang bersifat dinamis mengikuti kondisi sosial yang selalu berkembang. (Nazarudin Umar, 1999: xx). Pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam

realitasnya sama-sama mengalami *dehumanisasi*. Kaum perempuan mengalami *dehumanisasi* karena ketidakadilan gender dan kaum laki-laki mengalami *dehumanisasi* karena melanggengkan penindasan gender. Menurut hemat penulis, pola relasi antara keduanya tidak akan pernah saling bersinggungan secara harmonis jika budaya patriarkhis masih bergelindan ikut menjustifikasi pemahaman pola relasi antara keduanya.

Dikotomi peran domestik-publik antara laki-laki dan perempuan, menyebabkan perempuan “terpenjara” di ranah domestik dan laki-laki bebas bergerak di ranah publik. Dikotomi tersebut *linier* dengan pembakuan peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan berkewajiban mencari nafkah (publik, produksi), sedangkan perempuan (istri) sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengatur urusan kerumah tanggaan (domestik, reproduksi). Implikasinya adalah, adanya ketidakseimbangan pola relasi dalam rumah tangga, seperti: (1) istri harus patuh dan menghormati suami; (2) segala kegiatan istri di luar rumah harus sejalan suami dan; (3) istri bertanggung jawab terhadap semua kegiatan domestik (memasak, mencuci, mengasuh anak dan lain-lain). Sehingga secara sosial istri

adalah warga kelas dua, *inferior* yang berada di bawah dominasi laki-laki dan tentunya secara ekonomi menjadi tergantung pada laki-laki (suami). Inilah yang oleh Marx dan Engels disebut dengan pola relasi *materialist dterminism*. Menurut Mark dan Engel, dalam rumah tangga, suami sebagai cerminan kaum borjuis dan istri sebagai kaum proletar. (Collins Randall, 1987: 13, Lihat juga dalam Ratna megawangi, 1999: 131).

Fernando Bartolome dalam penelitiannya, mencoba untuk membuktikan kebenaran teori *materialist dterminism*. (Mardiana EM Pambudy, 2003: 546). Juga dalam (Sue Birley dan Daniel F. Muyka, 2004: 356). Ditemukan bahwa, pada rumah tangga di mana suami istri sama-sama bekerja dan berkarier, justru si istri malah mempunyai beban ganda dan tetap merupakan pihak yang paling menghabiskan waktu untuk melakukan kerja reproduksi yang tidak bernilai pasar. Keadaan tidak seimbang ini disebabkan oleh nilai-nilai patriarkhi. Konsep patriarkhi pertama kali diperkenalkan oleh Max Weber untuk menggambarkan sebuah struktur sosial dalam masyarakat tradisional praindustri di Barat. Menurut Weber patriarkhi adalah kekuasaan yang secara tradisional diberikan kepada laki-laki sebagai kepala

keluarga. Otoritas itu menjadikan laki-laki menguasai istri, anak-anaknya dan laki-laki yang lebih muda dalam rumah tangga, pekerja rumah tangga, budak dan orang lain yang menggantungkan hidupnya dalam rumah tangga tersebut. (Joyce P. Jacobsen, 1994: 546), yang diadopsi tidak hanya dalam kehidupan rumah tangga akan tetapi juga oleh semua masyarakat bahkan negara.

Menurut hemat penulis, masing-masing teori memang memiliki sudut pandang sendiri-sendiri mengenai sebab ketimpangan relasi gender. Akan tetapi konstruksi sosial budaya tetap berpengaruh secara signifikan terhadap pembagian peran yang dimainkan oleh kelompok-kelompok masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok-kelompok dengan jenis kelamin tertentu. Artinya konstruksi sosial budaya, turut memberikan konstribusi dalam penciptaan relasi antara laki-laki dan perempuan secara adil atau sebaliknya, terjadi ketimpangan.

Hal tersebut senada dengan pemikiran Joyce P. Jacobsen, yang berusaha mencari faktor penyebab ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga. Ada empat hal yang dijadikan acuan oleh Jacobsen dalam hal ini, antara lain: siapa penyumbang terbesar penghasilan rumah tangga; adanya

pengaruh nilai patriarkhi; perhatian perempuan dalam pengasuhan anak dan; siapa pemilik posisi menguntungkan dan lebih berpeluang memaksakan negosiasi pembagian kerja rumah tangga yang jauh dari setara dan meninggalkan perkawinan apabila negosiasi gagal. (Joyce P. Jacobsen, 1994: 23).

Walaupun di sini kultur patriarkhi menempati urutan sebagai variabel ke dua dalam memproduksi ketimpangan relasi gender, akan tetapi secara sadar maupun tidak, kultur patriarkhi telah memperteguh konstruksi perbedaan peran gender yang cenderung menguntungkan kaum laki-laki.

Sebenarnya dikhotomi pembakuan peran antara laki-laki dan perempuan tidak akan menjadi masalah, apabila tidak melahirkan ketimpangan relasi gender yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender. Akan tetapi realitasnya berlainan, oleh karena itu yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana dikhotomi pembakuan peran gender diproduksi sehingga menimbulkan ketimpangan relasi gender?

Proses pembentukan peran gender, pada umumnya diproduksi ketika seorang anak dilahirkan. Begitu lahir, melalui alat kelaminnya seorang anak dapat dikenali apakah dia laki-laki atau perempuan. Jika mempunyai *penis* maka

dikonsepsikan sebagai anak laki-laki dan jika mempunyai *vagina* maka dikonsepsikan sebagai anak perempuan. Pada saat yang bersamaan, peran gender dari lingkungan budaya masyarakatnya juga mulai diperoleh. Misalnya, anak yang secara biologis lahir sebagai laki-laki, maka oleh orang tua akan diberikan sinyal yang berbau maskulin, mulai dari mainan yang dipilih (pedang, pistol, pesawat, mobil-mobilan dan lain-lain), warna dan gambar baju yang dipakai sampai tokoh-tokoh permainan yang disosialisasikan juga bernuansa maskulin, heroik dan kuat. Sebaliknya bagi bayi perempuan, akan disuguh dengan berbagai hal yang bernuansa feminin. Misalnya: boneka, mainan masak-masakan dan berbagai atribut yang penuh dengan kelembutan dan non-heroik. Tujuan dari semua itu adalah, agar laki-laki memiliki karakteristik “kejantanan” atau *masculinity*, sedangkan perempuan memiliki karakteristik “kewanitaan” atau *feminity*. Dengan karakter tersebut, akhirnya perempuan dipersepsikan sebagai manusia yang lemah, gemulai, lembut dan lain-lain. Sebaliknya laki-laki dipersepsikan sebagai manusia perkasa, tegar, kuat, agresif dan lain-lain. Laki-laki dianggap lebih cerdas dan lebih kuat dalam banyak hal daripada perempuan. Anggapan

seperti itu dengan sendirinya memberikan peran gender dan status lebih tinggi pada laki-laki dalam relasi gender.

Pembenaran perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, pada akhirnya menimbulkan persoalan *bias* gender yaitu suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat bahkan negara. Persoalan *bias* gender inilah yang pada akhirnya melahirkan relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi diskriminasi, marginalisasi terhadap perempuan, subordinasi, stereotipe, beban ganda bahkan tindak kekerasan terhadap perempuan.

B. Institusi Keluarga

Institusi keluarga adalah institusi sosial dasar dari lembaga sosial yang lebih besar. Menurut Horton dan Hunt istilah keluarga digunakan untuk menunjuk beberapa pengertian, antara lain: (1) suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama; (2) suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan; (3) pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak; (4) pasangan nikah dengan anak; (5) satu orang, janda atau duda (*singgle*

parent) dengan satu atau beberapa anak. (J. Dwi narwoko dan Bagong Suyanto, 2007: 227). Lihat juga dalam Marion JJ Levy, n Books, 1971: 1-6).

Burgest dan Locke (1960) mengemukakan 4 (empat) ciri keluarga yaitu (a) Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan (pertalian antar suami dan istri), darah (hubungan antara orang tua dan anak) atau adopsi; (b) Anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama di bawah satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga. Tempat kos dan rumah penginapan bisa saja menjadi rumah tangga, tetapi tidak akan dapat menjadi keluarga, karena anggota-anggotanya tidak dihubungkan oleh darah, perkawinan atau adopsi, (c) Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan; Peranan-peranan tersebut diperkuat oleh kekuatan tradisi dan sebagian lagi emosional yang menghasilkan pengalaman; dan (d) Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum. Stephens mendefinisikan keluarga sebagai suatu

susunan sosial yang didasarkan pada kontrak perkawinan termasuk dengan pengenalan hak-hak dan tugas orang tua; tempat tinggal suami, istri dan anak-anak; dan kewajiban ekonomi yang bersifat *reciprocal* antara suami dan istri. (Herien Puspitawati, 2012: 2)

Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan-peranan tertentu, yaitu: a) Keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut. b) Keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut. c) Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomis yang secara materil memenuhi kebutuhan anggotanya. d) Keluarga batih

menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup. e) Keluarga batih merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Ciri-ciri umum keluarga yang dikemukakan oleh Mac Iver and Page yaitu: 1) Keluarga merupakan hubungan perkawinan. 2) Susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. 3) Suatu sistem tata nama, termasuk perhitungan garis keturunan. 4) Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan. Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun, tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok-kelompok keluarga.

Berangkat dari beberapa pemikiran tersebut, maka yang dimaksud institusi keluarga adalah sebuah institusi sosial dasar yang disatukan oleh perkawinan dan yang mempunyai komponen-komponen dengan peran sosial dan fungsi

masing-masing. Peran-peran sosial itu saling berhubungan secara timbal balik dan saling tergantung membentuk satu kesatuan rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi antar komponen sesuai dengan peran dan fungsinya sangat diperlukan agar sistem tersebut bisa berjalan.

C. Pandangan Teori Sosial Dan Feminis Tentang Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga

1. Teori Sosial.

a. Pandangan Teori Struktural – Fungsional.

Perhatian teori struktural fungsional terhadap relasi gender dalam institusi keluarga dipelopori oleh Talcot Parsons sebagai reaksi dari pemikiran-pemikiran tentang lunturnya fungsi keluarga karena adanya modernisasi. Menurut Parsons, keluarga ibarat hewan berdarah panas yang dapat memelihara temperatur tubuhnya agar tetap konstan walaupun kondisi lingkungan berubah. Hal ini bukan berarti keluarga selalu bersifat statis dan tidak bisa berubah, akan tetapi selalu beradaptasi mulus dengan lingkungan atau dalam bahasa Parson disebut dengan *dynamic equilibrium*. (Ratna Megawangi , 1994: 66).

Menurut teori ini dalam konteks relasi gender, pembagian peran secara seksual adalah wajar. Suami mengambil peran instrumental, membantu memelihara sendi-sendi masyarakat dan keutuhan fisik keluarga dengan jalan menyediakan bahan makanan, tempat pelindungan dan menjadi penghubung keluarga dengan dunia luar, *the world outside the home*. Sementara isteri mengambil peran ekspresif membantu mengentalkan hubungan, memberikan dukungan emosional dan pembinaan kualitas yang menopang keutuhan keluarga serta menjamin kelancaran urusan rumah tangga. Menurut teori ini, jika terjadi tumpang tindih dan penyimpangan fungsi antara satu dan lainnya, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Dengan kata lain kerancuan peran gender akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, atau bahkan perceraian.

Keseimbangan akan menciptakan sebuah sistem sosial yang tertib (*social order*). Ketertiban akan tercipta kalau ada struktur atau strata dalam keluarga, dimana masing-masing individu mengetahui posisinya dan patuh pada sistem nilai

yang melandasi struktur tersebut. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut maka tiga elemen utama dalam struktur internal keluarga harus saling terkait, antara lain: status sosial, peran sosial dan norma sosial. (T. Parsons dan R.F Bales, Kegan & Paul, 1976: 66).

Berdasarkan status sosial, keluarga dibagi dalam tiga struktur utama yaitu bapak/suami, ibu/istri dan anak-anak. Dalam struktur ini, masing- masing mempunyai status sosial yang memberikan identitas pada masing-masing individu. Misalnya, suami/ bapak adalah kepala rumah tangga , isteri adalah ibu rumah tangga dan lain-lain.

Sedangkan peran sosial adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat memotivasi tingkah laku seseorang yang menduduki status sosial tertentu. Setiap status sosial tertentu mempunyai fungsi dan peran yang diharapkan terkait interaksinya dengan individu lain dalam keluarga. Misalnya, seorang yang berstatus sebagai kepala rumah tangga, diharapkan mempunyai peran instrumental, yaitu menjamin kelangsungan hidup dan melindungi kelurganya. Sedangkan status ibu rumah tangga, mempunyai peran

emosional atau ekspresif yang bisa memberikan kelembutan, kasih sayang dan cinta dan tentunya berperan dalam lingkup domestik. Peran sosial ini sangat dipengaruhi oleh norma-norma budaya di mana mereka berada.

Norma sosial dalam institusi keluarga menurut pandangan aliran ini menjadi sesuatu yang penting, karena sebagai standar tingkah laku dalam kehidupan berkeluarga. Norma sosial ini sebagai aturan main dalam pembagian tugas sesuai dengan struktur keluarga sehingga semua bisa berjalan secara teratur. Menurut Levy dengan pembagian tugas ini dimaksudkan agar fungsi keluarga tidak terganggu sehingga relasi antara suami-istri bisa berjalan secara seimbang. Konflik dalam keluarga akan terjadi apabila antar anggota keluarga tidak memenuhi kesepakatan siapa yang akan memerlukan tugas apa. (J. Mc Intyre, 1966: 69. Lihat Juga dalam Ratna Megawangi, 1999: 68).

Harmoni dan stabilitas dalam keluarga, menurut teori fungsional stuktural sangat ditentukan oleh efektifitas konsensus nilai-nilai. Sistem ini senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan

keseimbangan (*equilibrium*). Meskipun konflik sewaktu-waktu bisa muncul tetap dalam batas yang wajar dan bukan merupakan ancaman yang bakal merusak sistem sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Talcot Parsons dan Robert Bales, bahwa relasi gender dalam institusi keluarga lebih merupakan pelestarian keharmonisan ketimbang bentuk persaingan. (T. Parsons dan R.F Bales, 1976: 32. Lihat juga Nazarudin Umar, 1999: 52). Pola relasi gender dalam konteks teori ini ditentukan oleh: **Pertama**, kekuasaan dan status. Laki-laki memiliki kekuasaan dan status lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Perempuan dinilai mempunyai perilaku lembut dan laki berpenampilan dan berprilaku tegar dan jantan sehingga memiliki status dan kekuasaan lebih besar. **Kedua**, komunikasi non verbal. Komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berlangsung dalam suasana yang disebut Nancy Henlley sebagai kemampuan kurang (*less powerful*) bagi perempuan dan kemampuan lebih (*more powerful*) bagi laki-laki. Dalam suasana selalu dikontrol, perempuan dengan subordinasinya menampilkan diri

dengan serba hati-hati, sedangkan laki-laki dengan otoritas yang dimiliki menampilkan diri lebih terbuka dan komunikatif. Sehingga dalam relasi gender laki-laki memiliki *skor* lebih unggul dalam penentuan norma-norma masyarakat. (Umar, 1999: 17). **Ketiga**, pembagian kerja. Relasi kuasa dan status yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar pembagian kerja dalam rumah tangga. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, kondisi ini tetap terjadi walaupun dalam konteks yang berbeda. Urusan-urusan produktif seakan-akan menjadi tugas laki-laki dan reproduktif menjadi tugas perempuan. Laki-laki dikonsepsikan mengurus urusan publik dan perempuan urusan domestik.

Menurut hemat penulis teori ini lebih menekankan pada pola relasi gender vertikal patriarkhi, sehingga apabila ada pergeseran pola relasi maka yang akan terjadi adalah disharmoni bahkan perceraian. Hal tersebut senada dengan pendapat Lindsey (J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto, 2004: 346). Teori ini secara idiologis telah digunakan untuk memberikan pengakuan terhadap

pelanggengan dominasi laki-laki dan stratifikasi gender dalam keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya.

b. Pandangan Teori Konflik

Pendekatan sosial konflik dalam institusi keluarga, dikembangkan oleh Friedrich Engels, yang mencoba menganalisis pola konflik dalam keluarga. Menurut Engels, keluarga *nukleur* dilihat dari pemilikan pribadi adalah penindasan paling parah terhadap perempuan. Pola relasi suami-isteri oleh Engels dianalogikan sebagai relasi antara kelas kapitalis dan proletar, hambatan, pemeras dan yang diperas, dan ini telah terkonstruksi dalam kehidupan masyarakat *dus rumah tangga*. Pola relasi tersebut oleh Marx dan Engels disebut dengan pola relasi *materialist determinism*. Marx dan Engels, menggunakan pola relasi materialis determinis untuk menggambarkan pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam institusi rumah tangga. Suami sebagai cerminan kaum borjuis dan istri sebagai kaum proletar. Teori ini mempengaruhi warna agama dan budaya, sehingga agama dan budaya pada masyarakat dengan

pola relasi materialis determinis akan konsisten dengan pola relasi hierarkhis dan paternalistik. (Collins Randall, 1987: 13). Lihat juga dalam Ratna megawangi, 1999: 131).

Tokoh lain adalah Collins dan Dahrendorf, yang mencoba menerapkan teori Marx dan Enggels secara lebih sistematis mengenai pola relasi antara suami-isteri. Dengan mengkritik model keluarga struktural-fungsional, Collins mengemukakan bahwa keluarga struktural-fungsional dijadikan institusi untuk melanggengkan sistem patriarkhi, dimana kedudukan suami-isteri dan anak-anak tetap dalam posisi vertikal sebagai struktur yang ideal. Padahal struktur vertikal justru berpotensi untuk timbulnya konflik yang berkepanjangan. Keluarga ideal menurut Collin adalah yang berlandaskan pada *companionship*, dimana relasi suami-isteri bersifat horizontal (tidak hierarkhis). Sedangkan Dahrendorf, menegaskan bahwa peran yang dilembagakan oleh institusi keluarga akan menciptakan pola relasi yang opresif, karena kedudukan perempuan dianggap sebagai "budak kecil tercinta". (CW. Mills, 1959: 10)

Menurut teori ini, situasi konflik dalam institusi keluarga tidak dianggap sebagai sesuatu yang abnormal atau disfungsional, akan tetapi sebagai sesuatu yang alami dalam proses sosial. Seorang suami yang mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga akan menimbulkan konflik terbuka dengan istrinya yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut adalah wajar dan alamiah, karena menurut pandangan teori ini siapa yang mempunyai kekuasaan akan menindas pada siapa yang ada di bawahnya.

Hubungan yang penuh konflik dalam institusi keluarga terjadi karena setiap individu cenderung memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) dan konflik pasti mewarnai keluarga, karena kesatuan individu dalam keluarga bukan dibentuk melalui asas harmoni melainkan dengan pemaksaan. Jika kesadaran isteri (perempuan)--- yang dalam teori ini digambarkan sebagai kaum proletar--- meningkat dan konflik tidak dapat dikendalikan maka yang terjadi adalah perubahan. Dalam konteks keluarga, perubahan bisa kearah positif maupun negatif.

Menurut hemat penulis, pola relasi horisontal dalam

teori ini apabila diterapkan pada keluarga yang sudah egaliter justru akan mendorong adanya perubahan yang positif dalam keluarga tersebut. Akan tetapi bagi keluarga yang belum egaliter justru akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut.

2. Pandangan Teori Feminis.

Kelompok feminis berpendapat bahwa keluarga adalah sumber eksplorasi khususnya bagi kaum perempuan. Pembagian kerja dan peran dalam keluarga menurut pandangan kelompok ini terjadi secara tidak adil dan tidak proposisional, sehingga relasi gender menjadi timpang. Pembagian kerja tersebut umumnya dilandasi oleh idiosi partrikhi. Melalui proses yang panjang dan *bias* “kepentingan” laki-laki, maka pembagian kerja dan peran di dalam keluarga, cenderung mempunyai beban yang tidak seimbang. Perempuan biasanya ditempatkan pada posisi yang harus menjalankan peran dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pekerjaan domestik dan laki-laki pada sektor publik. Pembagian kerja seperti ini sepantas kelihatan ringan, akan tetapi dalam prakteknya menyebabkan kaum perempuan harus bekerja dengan jam

yang lebih panjang dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Lebih lanjut yang terjadi bukan pembagian kerja dan peran antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkembang dan terus menerus dikonstruksi secara sosial budaya adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Implikasi yang paling menonjol dan memojokan kaum perempuan akibat perbedaan tersebut adalah terputusnya akses kelompok perempuan terhadap sumber daya utama (ekonomi, budaya dan politik) serta berpengaruh terhadap penilaian tempat dimana kaum perempuan “pantas” bekerja dan seberapa “pantas” kerja tersebut dihargai. Menurut teori ini, tujuan perkawinan akan tercapai jika dalam kelurga dibangun atas dasar relasi gender yang setara dan adil, dimana laki-laki perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peran dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, mengahargai dan bantu membantu diberbagai sektor kehidupan.

a. Feminis Liberal.

Feminisme liberal mengusung adanya persamaan hak agar perempuan diterima melalui cara yang sah dengan laki-laki. Hak-hak perempuan akan dapat terealisasi jika mereka disejajarkan dengan laki

laki. Aliran ini menyatakan bahwa, kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia pribadi dan umum. Setiap manusia mempunyai kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, terutama pada perempuan, akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing dalam kerangka persaingan bebas dan punya kedudukan setara dengan laki-laki. Tujuan umum dari feminism liberal adalah, untuk menciptakan “masyarakat yang adil dan peduli tempat kebebasan berkembang”. Hanya dalam masyarakat seperti itu, perempuan dan juga laki-laki dapat mengembangkan diri. Feminisme liberal berpandangan bahwa kaum perempuan harus mempersiapkan dirinya untuk dapat mensejajarkan kedudukannya dengan laki-laki dengan cara mengambil berbagai kesempatan yang menguntungkan serta mengenyam pendidikan, mengingat bahwa perempuan adalah mahluk yang rasional dan bisa berpikir seperti laki-laki.

Dalam pemikiran aliran ini laki-laki dan perempuan diciptakan secara seimbang dan serasi. Oleh karena itu seharusnya tidak terjadi penindasan antara satu dan lainnya. Pemikiran ini terinspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekhususan-kehkususan. Secara ontologis keduanya sama, hak laki-laki dengan sendirinya juga menjadi hak perempuan. Aliran ini membenarkan perempuan bekerjasama dengan laki-laki, mereka menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total di dalam semua peran termasuk peran publik. Caranya adalah dengan melibatkan perempuan dalam berbagai peran seperti peran sosial, ekonomi dan politik. Organ reproduksi bukan penghalang terhadap peran-peran tersebut, sehingga tidak ada kelompok dominasi jenis kelamin. Aliran ini menghendaki pola relasi gender 50/50. Oleh karena itu, menurut pandangan aliran ini, pola relasi antara suami istri dalam keluarga harus sama dengan ukuran yang sama pula. Artinya, tidak ada pembagian peran yang dikhotomis

antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

b. Feminis Sosialis

Aliran ini diwarnai oleh pemikiran-pemikiran Karl Max, di mana pola relasi gender dalam keluarga disebabkan oleh faktor budaya. Posisi inferior perempuan dalam institusi keluarga berkaitan dengan struktur keluarga dalam masyarakat kapitalis dan pola relasi yang timpang yang disebabkan oleh penerapan sistem kapitalis yang mendukung tenaga kerja tumpa upah bagi perempuan dalam lingkup rumah tangga. Akhirnya yang terjadi, isteri secara ekonomi tergantung pada suami dan mecemaskan keamanan ekonomi rumah tangganya karena dukungan kekuasaan kepada suami. Oleh karena itu agar pola relasi laki-laki dan perempuan seimbang diperlukan peninjauan struktur secara mendalam, terutama menghapuskan dikhotomi pekerjaan sektor domestik dan publik.

c. Feminis Radikal

Feminis radikal merupakan fenomena kontemporer sebagai gerakan pembebasan perempuan (*women's liberation movement*)

tahun 60-an. Feminis radikal menjadi kritik tajam bagi teori liberal dan sosialis dalam mengkonsepsi hakikat manusia dan kenyataan masyarakat (*human and social realities*). Feminis radikal adalah gerakan perempuan Amerika Serikat, yang didominasi oleh kelas menengah terdidik. Meskipun awalnya feminis radikal banyak dipengaruhi oleh mazhab sebelumnya, yakni feminis liberal dan sosialis, sehingga melahirkan 2 kelompok arus besar yaitu feminis radikal yang berhaluan liberal dan yang berhaluan sosialis-Marxian. Apa yang menarik dari aliran ini adalah, perempuan memiliki sendiri pengalaman ketertindasannya dan mengeksplorasi keperempuanan hingga batas-batas ekstrimnya, dan aliran ini menolak institusi keluarga baik secara teoritis maupun praktis. Institusi keluarga bagi aliran ini hanya akan memenjarakan kaum perempuan.

Beberapa pemikiran dari aliran ini, antara lain: 1) **Peran seks dan androgini.** Kehidupan perempuan ditransformasikan dari rumusan masalah individual perempuan menjadi persoalan sistem penindasan laki-laki atas perempuan. Peran dan stereotype seks harus dihapuskan dan

penindasan laki-laki terhadap perempuan harus dilawan, sehingga tercipta polarisasi seks yakni laki-laki versus perempuan; 2) **Biologi perempuan sebagai persoalan.** Objektivasi perempuan sebagai makhluk biologis sedikit banyak mempengaruhi konstruksi sosial atas mereka. Perempuan diasumsikan menjadi makhluk lemah secara biologis karena kemampuan reproduksi sosialnya. Pembagian kerja seksual memiliki basis biologis. Biologi reproduksi manusia telah membentuk organisasi sosial yang bernama “keluarga biologis”; 3) **Biologi perempuan sebagai solusi.** **Aliran ini** yakin, bahwa biologi laki-laki menjadi sumber masalah, yang mengendalikan berbagai hal atas perempuan. Biologi laki-laki telah men-devaluasi perempuan dan memanipulasinya menjadi sedemikian inferior. Gerakan kontemporer feminis radikal ialah merayakan kemerdekaan “biologi” perempuan dengan “gerakan persaudaraan perempuan”. Perempuan dapat menikmati tubuh dan seksualitasnya tanpa didikte oleh sistem nilai yang dikonstruksi oleh dominasi laki-laki. Perempuan menikmati tubuhnya, seksnya,

kebudayaannya, spiritualitasnya, tanpa terpaku pada acuan sosial yang ada. Haid sebagai kutukan Tuhan dewa digantikan menjadi berkah bagi perempuan dari Tuhan dewi. Mereka percaya bahwa cara perempuan memahami dunia jauh berbeda dengan cara laki-laki memahaminya dan; 4) **Orang tidak melahirkan perempuan.** Tubuh perempuan bukan hal yang alamiah, melainkan pelembagaan oleh masyarakat, misalnya melahirkan anak, merawat, dan sebagainya. Jadi, biologis kita adalah konstruksi sosial, sehingga kita sebetulnya “multi seks”, “bukan biseks”.

Berangkat dari pemikiran masing-masing teori (struktural fungsional, konflik dan feminis) di atas, mereka memiliki sudut pandang sendiri-sendiri mengenai pola relasi gender. Akan tetapi secara serempak mengakui bahwa konstruksi sosial budaya tetap berpengaruh secara signifikan atas pembagian peran yang dimainkan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam institusi keluarga. Artinya konstruksi sosial budaya sangat berperan dalam memberikan kontribusi penciptaan relasi antara laki-laki dan perempuan secara adil atau sebaliknya terjadi ketimpangan.

Hal tersebut senada dengan pemikiran Joyce P. Jacobsen, (Joyce P. Jacobsen, 1994: 23). yang berusaha mencari faktor penyebab ketidakseimbangan relasi gender dalam institusi rumah tangga. Ada empat hal yang dijadikan acuan oleh Jacobsen dalam hal ini, antara lain: siapa penyumbang terbesar penghasilan rumah tangga; adanya pengaruh nilai patriarkhi; perhatian perempuan dalam pengasuhan anak dan; siapa pemilik posisi menguntungkan dan lebih berpeluang memaksakan negosiasi pembagian kerja rumah tangga yang jauh dari setara dan meninggalkan perkawinan apabila negosiasi gagal. Dalam pemikiran Jacobsen tersebut, meskipun kultur patriarkhi menempati urutan sebagai variabel ke dua dalam memproduksi ketimpangan relasi gender, akan tetapi secara sadar maupun tidak, kultur patriarkhi telah memperteguh krontruksi perbedaan peran gender yang cenderung menguntungkan kaum laki-laki.

Penutup

Pandangan masing-masing teori, baik struktural fungsional, konflik dan

feminis terhadap relasi gender dalam institusi keluarga memang berbeda dan memiliki sudut pandang sendiri-sendiri. Akan tetapi secara serempak semuanya mengakui bahwa konstruksi sosial budaya tetap berpengaruh secara signifikan atas pembagianan peran yang dimainkan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam institusi keluarga. Artinya, konstruksi sosial budaya sangat berperan dalam memberikan konstribusi penciptaan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam isntitusi keluarga secara adil atau sebaliknya terjadi ketimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Birley, Sue dan Daniel F. Muyka, 2004, *Financial Time Mastering – Entreprenurship*, London: Pearson Education Limited.
- Collins, Randall, 1987, *Sosiologiy of Marriage and the family: Gender, love and Property*, Chicago: Nelson Hall.
- Dayakisni, Tri dan Hudaniah, 2003, *Psikologi Sosial*, Malang: UMM Press.
- Echols, John M dan Hasan Shadily, 1993, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Intyre, J. Mc., 1996, *The Structure – Fungsional Approach to Family*
- Study, New York: The Mcmillan Co.
- Jacobsen, Joyce P., 1994, *The Economics of Gender*, Massachusetts: Blackwell Publisher.
- Jalaludin, 2007, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Levy, Marion JJ, 1971, *The Revolution in Modern China*, New York: Octagon Books.
- M Lips, Hilary, 1993 *Sex and Gender : An Introduction*, London: Mayfield Publising Company.
- Megawangi, Ratna, 1999, *Membarkan Berbeda?: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Penerbit Mizan: Bandung.
- Mills, CW., 1959, *The Sociological Imagination*, New York: Oxford University Press.
- Narwoko J. Dwi, Bagong Suyanto, 2004, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Neufeldt, Victoria (ed), 1984, *Websters New World Dictionary*, New York: Websters New World Clevenland.
- Pambudy, Mardiana EM, 2003, *Karier dan Otonomi Perempuan*, Tesis Program kajian Wanita Fak. Pasca Sjiana UI.
- Parsons, T. dan R.F Bales, 1976, *Family: socialization and Interaction*

- Process*, London: Routledge, Kegan & Paul.
- Puspitawati, Herien, 2012, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor: PT IPB Press.
- Taufiq, Muhammad Izzudin, 2006, *Psikologi Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Tierney, Helen (ed), dalam *Women's Studies Encyclopedia*, Vol.1, New York: Green Wood Press.
- Umar, Nazarudin, 1999, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, Jakarta: Paramadina.
- Unger, Rhoda K., 1979, *Female and Male Psychological Perspective*, New York: Philadelpia